



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Revitalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM: Kajian Literatur atas Praktik Baik dari Kabupaten Kudus

Amalia✉

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

✉ email_penulis1/korespondensi

Info Artikel	Abstrak
Riwayat: Diterima : Direvisi : Disetujui :	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi sentral dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM melalui penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan pendanaan, serta fasilitasi digitalisasi dan legalisasi usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM dengan mengambil studi kasus Kabupaten Kudus sebagai praktik baik. Metode yang digunakan adalah kajian literatur tematik dengan pendekatan naratif-kritis, mengacu pada sumber-sumber ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan daerah seperti RPJMD Kudus 2025–2029, Peraturan Daerah, laporan kinerja perangkat daerah, dan publikasi resmi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus mampu membangun model pemberdayaan UMKM yang bersifat kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis potensi lokal. Integrasi antara kebijakan ekonomi, pendidikan vokasi, dan kolaborasi swasta melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja menjadi kekuatan utama dalam mendorong UMKM naik kelas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tata kelola daerah yang adaptif dan responsif merupakan faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Studi ini memberikan kontribusi teoritis pada diskursus desentralisasi fiskal dan praktik pemberdayaan berbasis daerah, serta merekomendasikan agar pendekatan serupa diadopsi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masing-masing wilayah.
Kata kunci: Ekonomi lokal, kebijakan UMKM, pemberdayaan, praktik baik, pemerintah daerah.	

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 57% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97,24% dari total tenaga kerja (Fithriyati, 2013). Peran dominan ini menempatkan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendukung pemerataan pendapatan serta pembangunan inklusif. Namun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan akses permodalan, lemahnya kemampuan pemasaran, serta minimnya keterampilan manajerial dan teknis (Maulana, 2017).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat telah meluncurkan sejumlah strategi pemberdayaan, mulai dari stimulus fiskal hingga reformasi regulasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif (El Darman, 2023). Di tingkat daerah, pemerintah lokal memegang peran strategis dalam mendesain dan mengimplementasikan program pemberdayaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Siti Nurhalita & Imsar, 2022). Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang menonjol dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM, melalui sinergi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya daerah seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Selain intervensi dari sisi kebijakan, pemberdayaan UMKM juga dapat ditopang oleh penguatan modal sosial, seperti kepercayaan, norma, dan kerja sama dalam kelompok usaha, yang terbukti efektif dalam membangun kemandirian usaha (Maulana, 2017). Strategi nasional pemberdayaan UMKM juga mencakup upaya peningkatan iklim usaha, akses terhadap sumber daya produktif, pengembangan produk dan pasar, peningkatan daya saing SDM, serta penguatan kemitraan antar-UMKM dan dengan usaha besar (Fithriyati, 2013).

UMKM memiliki peran sentral dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan. Di Indonesia, pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang berperan sebagai pengatur, fasilitator, dan katalisator pengembangan UMKM di wilayah masing-masing (Firdaus, 2020). Pemerintah daerah mendukung UMKM melalui pembuatan regulasi, penyediaan pelatihan, bantuan keuangan, dan pengembangan infrastruktur pendukung (Nona Ensy et al., 2023; Ondang et al., 2019).

Salah satu aktor kunci dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan tersebut adalah Dinas Koperasi dan UKM, yang memiliki mandat untuk melakukan sosialisasi, penguatan kelembagaan, perlindungan, serta pemeliharaan keberlanjutan usaha mikro (Nona Ensy et al., 2023). Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti menciptakan iklim usaha yang kondusif dan merumuskan kebijakan publik yang efektif bagi pengembangan UMKM lokal (Ondang et al., 2019).

Kabupaten Kudus, sebagai salah satu daerah dengan kontribusi industri yang signifikan, memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM yang berbasis sektor unggulan lokal. Dalam konteks ini, manajemen operasional dan posisi pasar menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan UMKM di daerah tersebut (Gunawan, 2019). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pelaku UMKM menjadi prasyarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Namun demikian, masih terbatas kajian ilmiah yang secara sistematis menganalisis peran pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM berbasis praktik baik di level lokal.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi fundamental dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah dan nasional. Sebagai pilar ekonomi rakyat, UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam konteks Indonesia, ideologi *Sistem Ekonomi Kerakyatan* menjadi landasan normatif dan strategis untuk memberdayakan UMKM secara berkelanjutan, dengan fokus pada kemandirian ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (Styaningrum, 2021).

Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan mendasar seperti keterbatasan akses pasar, minimnya pengembangan usaha, dan kendala pembiayaan yang berkelanjutan (Machmud, 2012). Globalisasi dan disrupsi digital turut memperkuat kebutuhan akan peningkatan inovasi, penguatan sumber daya manusia, serta ekspansi pemasaran berbasis teknologi informasi (Sedyastuti, 2018). Dalam situasi ini, keberadaan pemerintah daerah memiliki peran vital sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan adaptif (Jaelani & Fidaris, 2024).

Strategi pemberdayaan yang komprehensif mencakup pemberian informasi yang relevan, pembukaan akses terhadap pendanaan, penyediaan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam penguasaan teknologi informasi (Sedyastuti, 2018). Lebih lanjut, sinergi multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM yang berdaya saing tinggi (Sedyastuti, 2018; Styaningrum, 2021).

Kabupaten Kudus, sebagai daerah dengan potensi industri dan ekonomi lokal yang kuat, menyediakan contoh menarik dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan UMKM berbasis

lokal. Sayangnya, kajian ilmiah yang secara sistematis menyoroti peran aktif pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kudus masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik baik (best practice) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan UMKM melalui telaah literatur tematik, guna memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi praktis yang dapat direplikasi di wilayah lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur tematik untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, dengan menjadikan Kabupaten Kudus sebagai studi kasus praktik baik. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan penelusuran mendalam terhadap teori, kebijakan, dan implementasi strategi pemberdayaan UMKM dari berbagai sumber yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini mencakup literatur primer berupa artikel jurnal nasional dan internasional terindeks yang membahas tema UMKM, ekonomi kerakyatan, peran pemerintah daerah, dan sinergi multipihak, serta literatur sekunder seperti buku ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029, peraturan daerah terkait, laporan pelaksanaan program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), serta dokumen kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi koperasi dan UMKM.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui berbagai basis data seperti Google Scholar, Garuda, dan DOAJ, dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain “pemberdayaan UMKM”, “peran pemerintah daerah”, dan “kebijakan ekonomi lokal”. Literatur yang dipilih adalah publikasi akademik maupun kebijakan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2012 hingga 2024 dan dinilai memiliki relevansi tinggi terhadap fokus penelitian. Seluruh literatur yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan memetakan tema-tema utama yang muncul, seperti peran fasilitatif dan regulatif pemerintah daerah, strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal, sinergi antara pemangku kepentingan, serta praktik keberhasilan di tingkat daerah. Analisis dilakukan secara naratif-kritis untuk mengidentifikasi pola intervensi yang berhasil serta variabel kunci yang mendukung efektivitas pemberdayaan UMKM. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber dan perbandingan silang antara literatur akademik dan dokumen kebijakan resmi, sehingga hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pemberdayaan UMKM yang adaptif dan dapat direplikasi di wilayah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Ekosistem UMKM

Pemerintah daerah memegang peran yang sangat strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, terutama di daerah dengan basis ekonomi lokal yang kuat seperti Kabupaten Kudus. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk regulasi dan fasilitasi, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor yang mencerminkan prinsip *collaborative governance*. Studi-studi terkini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal terbukti menghasilkan dampak positif terhadap pengembangan UMKM, khususnya di wilayah perdesaan yang memerlukan dukungan struktural lebih besar (Supriyanto & Iskandar, 2022; Yendi, 2020). Dalam konteks ini, Kabupaten Kudus menempatkan program pemberdayaan UMKM sebagai bagian integral dari visi pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Sebagai contoh konkret, program-program seperti pelatihan wirausaha berbasis kompetensi, pemberian dukungan finansial, dan legalisasi usaha mikro dijadikan prioritas dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Salah satu program nasional yang turut diadopsi di level lokal adalah Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang telah terbukti mampu menurunkan angka pengangguran dan menciptakan wirausaha baru melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pendampingan kewirausahaan (Murdianto et al., 2024). Dalam RPJMD Kudus, pendekatan ini tercermin dalam beberapa program unggulan seperti pelatihan usaha, pengembangan koperasi, dan transformasi usaha informal menjadi formal.

Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberdayaan UMKM melalui sejumlah program yang terstruktur dan terintegrasi dalam dokumen RPJMD 2025–2029.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, kapasitas, dan daya saing pelaku usaha mikro. Tabel 1 berikut merangkum program-program utama yang diusung Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memperkuat sektor UMKM di wilayahnya.

Tabel 1. Program Pemberdayaan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

Program	Outcome	Indikator Kinerja Utama
Pemberdayaan UMKM	Meningkatnya kapasitas UMKM mandiri	Persentase UMKM yang bertransformasi informal → formal
Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Pendidikan & Pelatihan UMKM	Meningkatnya kompetensi SDM kewirausahaan	Persentase SDM UMKM yang mengikuti pelatihan
Penilaian Kesehatan Koperasi	Meningkatnya pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif dan sehat secara kelembagaan
Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya layanan legalitas koperasi/UMKM	Pertumbuhan volume usaha koperasi

Sumber: RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

Program pemberdayaan ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari legalisasi usaha, pelatihan dan pendidikan, hingga penilaian kesehatan kelembagaan koperasi. Salah satu indikator kunci yang ditekankan adalah transformasi UMKM dari sektor informal ke formal, yang mencerminkan keberhasilan dalam membangun basis ekonomi rakyat yang legal dan berdaya saing. Selain itu, fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi kendala rendahnya kapasitas manajerial dan teknis pelaku UMKM.

Meskipun arah program dan dukungan kelembagaan terlihat cukup komprehensif, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek pemantauan dan evaluasi dampak, kurangnya komitmen aktor pelaksana, serta keterbatasan kapasitas implementor di tingkat teknis (Yendi, 2020). Tantangan-tantangan ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme koordinasi lintas OPD dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Intervensi kebijakan yang bersifat sektoral tanpa koordinasi sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih program atau minimnya keberlanjutan intervensi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai studi merekomendasikan peningkatan integrasi antara kebijakan nasional dan realitas lokal, peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta, serta penyediaan pelatihan literasi digital bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing dalam ekonomi berbasis teknologi (Murdianto et al., 2024). Selain itu, intervensi yang lebih terarah dalam aspek manajemen, akses pasar, dan inovasi produksi terbukti efektif dalam meningkatkan hasil pembangunan UMKM secara keseluruhan (Apriliani et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan Pemerintah Kabupaten Kudus yang menekankan pada pelatihan keterampilan, legalisasi usaha, dan penguatan koperasi merupakan langkah strategis yang relevan dan selaras dengan praktik terbaik dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Indonesia.

2. Pola Praktik Baik Kabupaten Kudus

Pengembangan UMKM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan langsung maupun regulatif yang terintegrasi. Kabupaten Kudus, sebagai wilayah dengan basis industri kuat dan jaringan UMKM yang berkembang, telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan pemberdayaan yang selaras dengan prinsip pembangunan kolaboratif. Berbagai studi menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah berupa bantuan modal, perizinan usaha, sertifikasi produk, digitalisasi, serta fasilitasi pemasaran daring merupakan faktor kunci yang mendorong pertumbuhan UMKM di tingkat lokal (Kusnadi et al., 2020; Tambunan, 2023). Dalam konteks ini, Kabupaten Kudus memformulasikan arah kebijakan penguatan UMKM secara eksplisit di dalam dokumen RPJMD 2025–2029 sebagai bagian dari strategi ekonomi kerakyatan.

Implementasi kebijakan di Kudus memperlihatkan konsistensi antara rancangan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan. Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus, misalnya, merancang berbagai program pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, serta penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku usaha. Pendekatan ini sesuai dengan temuan Kusnadi et al. (2020) bahwa efektivitas kebijakan UMKM sangat bergantung pada pemahaman terhadap kebutuhan kelompok sasaran, tujuan perubahan, proses pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya yang tepat. Selain itu, pelibatan komunitas UMKM dan asosiasi pelaku usaha dalam forum komunikasi daerah menjadi praktik baik yang memperkuat aspek partisipatif dalam perencanaan program (Kusnadi et al., 2020).

Dukungan terhadap UMKM di Kudus tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga diperkuat oleh keterlibatan sektor swasta dalam bentuk pelatihan, penyediaan teknologi, hingga pembukaan akses jejaring bisnis. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan pendekatan strategis yang berorientasi pada efisiensi operasional, inovasi produk, dan keberlanjutan usaha. Pristanto Ria Irawan et al. (2025) menunjukkan bahwa strategi korporasi hijau dan sinergi multisektor memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM, terutama dalam peningkatan daya saing dan penetrasi pasar digital. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI), pelatihan wirausaha digital, serta program digitalisasi UMKM yang dilaksanakan di Kudus bekerja sama dengan berbagai pihak (Irawan et al., 2025).

Keseluruhan arah kebijakan tersebut dirangkum secara sistematis dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dan ditampilkan dalam Tabel 2. Tabel ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus tidak hanya menempatkan UMKM sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Penekanan pada pendekatan berbasis potensi lokal, seperti penguatan industri hasil tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), serta keterpaduan antara pelatihan dan transformasi digital, menjadi indikator bahwa praktik yang diterapkan di Kudus dapat dikategorikan sebagai *best practice* yang layak direplikasi oleh daerah lain.

Tabel 2. Strategi Prioritas Ekonomi Kerakyatan dan UMKM dalam RPJMD Kab. Kudus

Strategi Pemerintah Daerah	Arah Kebijakan Terkait UMKM
Penguatan ekonomi kerakyatan	Mendorong UMKM baru dan PKL berbasis potensi lokal
Bangga Buatan Indonesia (BBI)	Kampanye penggunaan produk lokal Kudus
Digitalisasi ekonomi	Pelatihan wirausaha berbasis teknologi
Peningkatan lapangan kerja UMKM	<i>Link & match</i> sektor industri dan usaha kecil
Optimalisasi DBH CHT	Alokasi stimulus UMKM sektor hasil tembakau

Sumber: RPJMD Kab. Kudus Tahun 2025-2029

Melalui strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kudus mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan UMKM ke dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari kampanye “Bangga Buatan Indonesia”, digitalisasi ekonomi, hingga optimalisasi pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau. Sinergi lintas sektor—termasuk pendidikan vokasi, pelatihan, dan kerja sama dengan industri—menunjukkan praktik tata kelola kolaboratif yang menjadi salah satu kekuatan utama model Kudus dalam membangun ekosistem UMKM yang adaptif.

3. Pembelajaran dan Implikasi untuk Replikasi

UMKM atau usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran (Wuryandani & Meilani, 2013). Namun, seperti yang ditemukan dalam berbagai studi, UMKM masih menghadapi beragam tantangan, seperti keterbatasan akses pemasaran, kesulitan pendanaan, keterbatasan inovasi, serta masalah ketersediaan bahan baku (Wuryandani & Meilani, 2013). Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif yang sesuai dengan potensi dan permasalahan lokal. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Kudus menunjukkan model pemberdayaan yang cukup terstruktur dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil.

Belajar dari beberapa daerah lain di Indonesia, terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat menjadi referensi pembandingan terhadap pola yang diterapkan di Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Jepara, misalnya, telah membentuk *SME Centre* sebagai pusat layanan usaha, pembinaan, dan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku UMKM di sektor industri mebel yang menjadi unggulan daerah (Kustanti, 2022). Kabupaten Sumedang mengutamakan penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan produk, sekaligus menjembatani akses permodalan dengan lembaga keuangan (Risnawati, 2019). Pendekatan ini memberikan pembelajaran penting bahwa dukungan terhadap UMKM harus diarahkan tidak hanya pada insentif jangka pendek, tetapi juga penguatan kapasitas jangka panjang.

Di Kabupaten Sleman, pendekatan berbasis spasial telah diterapkan dalam perencanaan dan pengembangan UMKM. Melalui analisis persebaran UMKM secara geografis, pemerintah dapat mengidentifikasi kecamatan dengan potensi tertinggi seperti Sleman, Ngaglik, dan Kalasan, untuk dioptimalkan sebagai sentra pengembangan UMKM berbasis klaster (Suherningtyas, 2019). Pendekatan berbasis data spasial ini relevan untuk diterapkan di Kudus, mengingat kabupaten ini memiliki wilayah dengan karakteristik ekonomi dan sektor unggulan yang berbeda-beda, seperti kawasan industri, sentra batik, serta wilayah pengolahan tembakau.

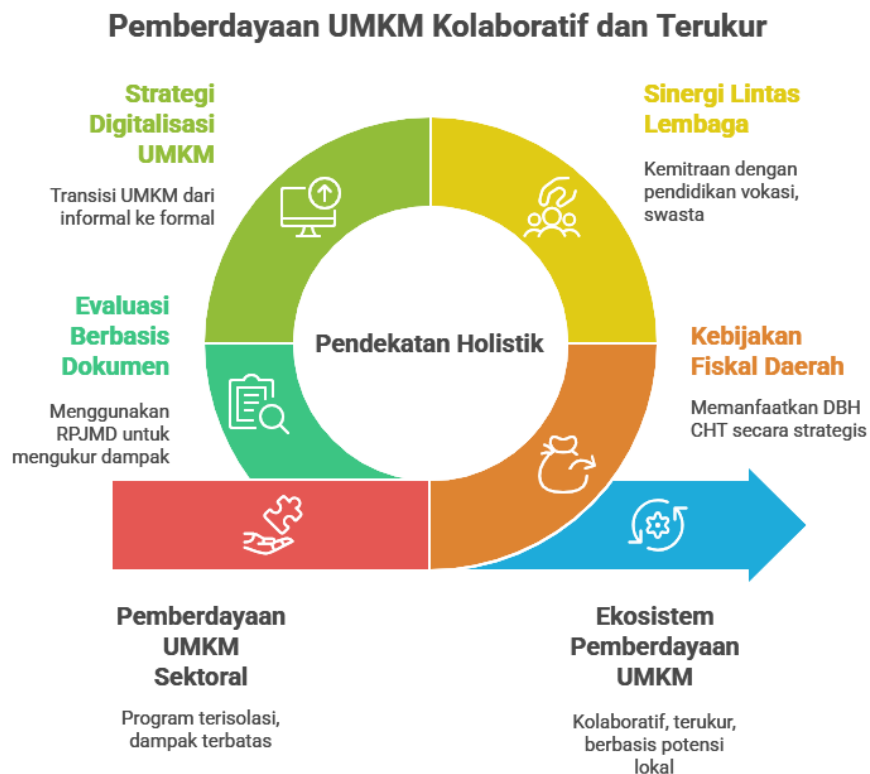
Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun indikator kinerja UMKM secara terukur dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Indikator-indikator tersebut mencerminkan fokus kebijakan pada aspek formalisasi usaha, pertumbuhan wirausaha baru, penguatan kemitraan, serta digitalisasi pelaku UMKM. Keberhasilan pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029. Indikator tersebut tidak hanya mencerminkan capaian kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan arah kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang terencana dan berbasis data. Tabel 3 berikut menyajikan indikator-indikator kunci tersebut.

Tabel 3. Indikator Kinerja UMKM dalam RPJMD Kab. Kudus

Indikator Kinerja	Target (2029)	Keterangan Tambahan
UMKM Bertransformasi ke Formal	$\geq 65\%$	Transformasi legalitas dan perizinan
Pertumbuhan Wirausaha Baru	$\geq 12\%$ per tahun	Termasuk pelaku baru hasil pelatihan
Kemitraan UMKM dengan sektor industri	$\geq 30\%$	Penekanan pada ekspor dan distribusi nasional
Pelaku UMKM Terlatih TI & Digitalisasi	$\geq 60\%$	Fokus pelatihan digital, pemasaran online
Proporsi UMKM Akses Modal Produktif	$\geq 75\%$	Melalui lembaga pembiayaan dan koperasi

Sumber: RPJMD Kab. Kudus 2025-2029

Temuan utama dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengandung unsur kebaruan (novelty) yang terletak pada identifikasi dan pemetaan pola intervensi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM yang bersifat kolaboratif, terukur, dan berbasis potensi lokal. Studi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus tidak hanya menjalankan program secara sektoral, tetapi telah membangun ekosistem pemberdayaan yang menyatukan elemen kebijakan fiskal daerah (seperti pemanfaatan DBH CHT), sinergi lintas lembaga (termasuk dengan pendidikan vokasi dan sektor swasta), serta strategi digitalisasi UMKM yang diarahkan pada transisi dari informal ke formal.



Gambar 1. Diagram Alur Pemberdayaan UMKM Kolaboratif dan Terukur

Hal ini menunjukkan pendekatan holistik yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya, terutama dalam konteks daerah yang memiliki kekuatan industri spesifik. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan dokumen perencanaan daerah (RPJMD 2025–2029) sebagai instrumen evaluatif untuk mengungkap kesinambungan antara perencanaan makro dan dampak mikro terhadap UMKM, serta penguatan argumentasi bahwa indikator kinerja yang ditetapkan secara eksplisit di tingkat kabupaten merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemberdayaan UMKM yang berbasis bukti. Temuan ini memperkaya wacana akademik mengenai peran strategis pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan menawarkan model replikasi yang kontekstual bagi daerah lain di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah berhasil membangun model pemberdayaan UMKM yang terstruktur, adaptif, dan kolaboratif melalui sinergi antara kebijakan daerah, dukungan lintas sektor, serta pelibatan langsung pelaku usaha lokal. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan *collaborative governance* yang terintegrasi dengan potensi daerah, seperti optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan, menjadi kekuatan utama dalam mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menuju formal, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Pola praktik yang diterapkan di Kabupaten Kudus dapat dikategorikan sebagai *best practice* yang tidak hanya berhasil merespons kebutuhan aktual pelaku UMKM, tetapi juga memiliki potensi untuk direplikasi secara luas oleh daerah lain di Indonesia. Kehadiran indikator kinerja yang terukur dalam RPJMD menunjukkan orientasi jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berbasis data. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya memperkuat argumentasi

teoretis tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berdampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi daerah.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Kudus memperkuat kelembagaan pemberdayaan UMKM dengan membangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih integratif dan berbasis data. Hal ini mencakup penyelarasan antara perencanaan daerah dengan pelaksanaan program di tingkat teknis, terutama dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan UMKM berbasis teknologi dan digitalisasi. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, agar capaian program dapat diukur secara akurat dan dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan lanjutan. Selain itu, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan vokasi, dan asosiasi UMKM perlu dipertahankan dan diperluas dalam kerangka *collaborative governance* yang partisipatif. Di sisi lain, untuk memperluas dampak jangka panjang, Pemerintah Daerah perlu mendorong replikasi praktik baik ini di sektor-sektor ekonomi kreatif dan wilayah potensial lainnya di luar sektor hasil tembakau. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus dapat menjadi model berkelanjutan yang tidak hanya menguatkan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kudus atas dukungan dan komitmennya dalam menyediakan data, informasi, serta kebijakan strategis yang menjadi dasar penting dalam penyusunan kajian ini. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus yang telah memberikan akses terhadap dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD 2025–2029, serta memberikan ruang diskusi yang konstruktif bagi pengembangan kajian ilmiah terkait pemberdayaan UMKM di tingkat daerah. Dukungan kelembagaan ini sangat berarti dalam memperkuat kontribusi penelitian terhadap pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis bukti..

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, A., Wahyudin, C., Hastuti, A., Tri Ramdani, F., Andani, H., & Sonia Irlis, S. (2024). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 275–286. <https://doi.org/10.30997/qh.v10i3.15865>
- El Darman, A. A. (2023). Strategic Issues of MSME Empowerment Policy at the G20 Indonesia Presidency. *Jurnal Analis Kebijakan*, 6(1), 18–34. <https://doi.org/10.37145/jak.v6i1.493>
- Fithriyati, H. (2013). STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA. *SOCIETY*, 4(2), 53–67. <https://doi.org/10.20414/society.v4i2.335>
- Gunawan, K. (2019). Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Kudus). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4715>
- Irawan, P. R., Natasari, N., & Taufik Hidayat, R. (2025). Pengaruh Green Corporate Strategy Dan Cross Sector Collaboration Terhadap Kinerja UMKM Kelurahan Koja. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1088–1095. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14984>
- Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(2), 151–162. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953>
- Kusnadi, I. H., Natika, L., & Alsonia, D. O. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i2.937>

- Kustanti, R. (2022). Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekobistek*, 239–244. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.366>
- Machmud, A. (2012). *STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA*. Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan.
- Maulana, A. A. (2017). PERSPEKTIF MODAL SOSIAL UNTUK KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAERAH (STUDI PADA PEDAGANG DI KAWASAN PANTAI KAMALI KOTA BAUBAU-SULAWESI TENGGARA). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(1), 60–69. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.730>
- Murdianto, M., Saharuddin, S., Indriana, H., Kusumawati, A. A. E. D., & Putra, R. A. (2024). Peran Pemerintah dalam Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 7(3), 18–28. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i3.4239>
- Nona Ensy, M., Nona Dince, M., & Pati Sanga, K. (2023). PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIKKA (Studi Kasus pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kab. Sikka). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.59603/accounting.v2i2.174>
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif E-Journal Unsrat*, 3(3), 1–10.
- Risnawati, N. (2019). PROFIL UMK, PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMBERDAYAANNYA. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(2), 145–161. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i2.55>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Siti Nurhalita & Imsar. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LANGKAT. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Styaningrum, F. (2021). KONSEP SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 565. <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i08.p01>
- Suherningtyas, I. A. (2019). Analisis Spasial Persebaran Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *JURNAL GEOGRAFI*, 11(1), 101–107. <https://doi.org/10.24114/jg.v11i1.12233>
- Supriyanto, S., & Iskandar, F. (2022). IMPLEMENTASI KOLABORASI MODEL PENTAHELIX DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN UMKM EX LOKALISASI DOLLY PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus DS.Point). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(1), 71–91. <https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v12i1.64>
- Tambunan, T. S. (2023). Analisis peran pemerintah daerah mendukung UMKM naik kelas. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 77–88. <https://doi.org/10.51622/jbm.v1i2.1990>
- Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 103–115. <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.71>
- Yendi, A. (2020). Collaborative Governance Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.36917/japabis.v2i2.25>